

# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah

TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI RIAU**



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

**PEKANBARU**

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2024

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,**



**SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19710729 199302 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKjIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas PUPRPKPP tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKjIP Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2023 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI RIAU,



**Muh. Arief Setiawan, M.T**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721202 199903 1 007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1.    LATAR BELAKANG .....	1
1.2.    STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1.3.    TUGAS DAN FUNGSI .....	5
1.4.    ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	8
1.5.    PERMASALAHAN UTAMA .....	8
BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1.    RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	12
2.2.    PERJANJIAN KINERJA Tahun 2023.....	26
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	27
3.1.1    Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun ini .....	28
3.1.2    Perbandingan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	30
3.1.3    Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra Perangkat Daerah .....	38
3.1.4    Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.....	40
3.1.5    Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan	42
3.1.6    Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	53
3.2.    REALISASI ANGGARAN.....	79
BAB IV    PENUTUP .....	81

Lampiran ..... 83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu Strategis .....	8
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas PUPRPKPP Riau .....	12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.....	13
Tabel 2.3 Target bobot per tahun penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis.....	14
Tabel 2.4 Target Pemenuhan Kapasitas layanan air minum.....	16
Tabel 2.5 Target persentase layanan air minum s/d 2024.....	17
Tabel 2.6 Target penyediaan dokumen perencanaan s/d 2024.....	18
Tabel 2.7 Target penyediaan lahan TPA .....	18
Tabel 2.8 Formulasi Indikator Rasio Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.....	20
Tabel 2.9 Komponen penyelenggaraan penataan ruang .....	21
Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.....	26
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	28
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	30
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra Perangkat Daerah.....	38
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional .....	40

Tabel 3.6 Capaian Kinerja.....	42
Tabel 3.7 Analisa Keberhasilan/Kegagalan .....	43
Tabel 3.8 Solusi .....	45
Tabel 3.9 Data Jenis Jabatan Dinas PUPRPKPP Riau .....	46
Tabel 3.10 Rincian Jenis Jabatan Per Bidang.....	47
Tabel 3.11 Bobot Indikator .....	48
Tabel 3.12 Bobot Pagu .....	49
Tabel 3.13 Analisa Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggarn.....	51
Tabel 3.14 Realisasi Perjanjian Kinerja .....	53
Tabel 3.15 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1.....	55
Tabel 3.16 Rencana Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan.....	56
Tabel 3.18 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2.....	58
Tabel 3.19 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 (Air Minum) .....	60
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Penyediaan Air Minum .....	61
Tabel 3.21 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 (TPA) .....	62
Tabel 3.22 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 (SPALD).....	63
Tabel 3.23 Rencana Penyediaan Dokumen SPALD.....	64
Tabel 3.24 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 (Jaringan Irigasi).....	64
Tabel 3.25 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 (Penanganan Banjir) .....	65

Tabel 3.26 Realisasi Indikator Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.....	65
Tabel 3.27 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5.....	67
Tabel 3.28 Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	69
Tabel 3.29 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6 (Kumuh).....	70
Tabel 3.30 Capaian Penanganan Kumuh 2023.....	71
Tabel 3.31 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6 (PSU).....	71
Tabel 3.32 Target Penyediaan PSU.....	75
Tabel 3.33 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 7.....	76
Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.....	77
Tabel 3.35 Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Capaian Indikator 1 .....	32
Gambar 2 Grafik Capaian Indikator 2 .....	32
Gambar 3 Grafik Capaian Indikator 3 .....	33
Gambar 4 Grafik Capaian Indikator 4 .....	33
Gambar 5 Grafik Capaian Indikator 5 .....	34
Gambar 6 Grafik Capaian Indikator 6 .....	34
Gambar 7 Grafik Capaian Indikator 7 .....	35
Gambar 8 Grafik Capaian Indikator 8 .....	35
Gambar 9 Grafik Capaian Indikator 9 .....	36
Gambar 10 Grafik Capaian Indikator 10 .....	36
Gambar 11 Grafik Capaian Indikator 11 .....	37
Gambar 12 Diagram Jenis Jabatan .....	46

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang mendorong setiap instansi pemerintah dalam bertanggung jawab akan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program serta kegiatan. Akuntabilitas kinerja yang baik dan terpercaya (*good governance*) juga menjadi suatu prasyarat dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mempunyai peran penting dalam menjadi alat kendali dalam memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian visi misi pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap perangkat daerah (PD) atas penggunaan seluruh sumber dayanya; meliputi sumber daya manusia (*Human Resources*), sarana prasarana, serta anggaran (*Fund*) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran berlangsung.

Pada Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.645.837.710.809,00 untuk mewujudkan penyelenggaraan kemantapan jalan, pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur permukiman, pembangunan dan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Riau, pembinaan jasa konstruksi, serta mewujudkan tata Kelola Rencana Tata ruang yang baik dan terencana serta berkelanjutan. Hal tersebut di atas merupakan target capaian yang tertuang pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-

2024, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, serta Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2023.

Atas penjabaran tugas dan fungsi tersebut, serta memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mewujudkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau berkewajiban dalam pelaksanaannya untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini juga memuat ikhtisar pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Laporan Kinerja ini juga akan menjelaskan capaian kinerja tahun berjalan, perbandingan kinerja antara capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, perbandingan antara capaian kinerja tahun berjalan dengan target kinerja lima tahun yang tertuang pada dokumen RENSTRA, serta analisis penyebab keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian kinerja baik pada skala program maupun kegiatan pada tahun berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 meliputi 4 segmen naratif; BAB I PENDAHULUAN memuat penjabaran latar belakang

dan aspek strategis yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), BAB II PERENCANAAN KINERJA mengurai penjelasan terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah serta pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, BAB III AKUNTABILITAS KINERJA memuat pengukuran dan formulasi terkait capaian kinerja serta analisis-analisis yang diperlukan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja perangkat daerah, dan BAB IV PENUTUP sebagai konklusi dari pengukuran yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi terdapat Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dalam Pergub No.46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
  1. Seksi Sungai, Danau dan Pantai; dan
  2. Seksi Irigasi, Rawa.
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
  1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
  2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri dari:
  1. Seksi Pertanahan; dan
  2. Seksi Penataan Ruang.
- g. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:
  1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
  2. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;
- j. UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A;
- k. UPT Peralatan Konstruksi, Kelas B;
- l. UPT Wilayah I, Kelas A;
- m. UPT Wilayah II, Kelas A;
- n. UPT Wilayah III, Kelas A;

- o. UPT Wilayah IV, Kelas A;
- p. UPT Wilayah V, Kelas A;
- q. UPT Wilayah VI, Kelas A;

### 1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai Fungsi sebagai berikut :

#### 1. Kesekretariatan

- Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan Gedung kantor
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan administrasi terkait surat menyurat dan kepegawaian

#### 2. Bidang Sumber Daya Air

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan provinsi. Pemeliharaan sungai, pantai pada wilayah sungai kewenangan provinsi
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

#### 3. Bidang Bina Marga,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan kewenangan provinsi.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

#### 4. Bidang Cipta Karya,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan kewenangan provinsi.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

#### 5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

#### 6. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang,
- pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah relokasi program pemerintah.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

#### 7. Bidang Bina Jasa Konstruksi;

- Pelaksanakan kegiatan pelatihan tenaga konstruksi,
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

#### 8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah I,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
- pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

#### 9. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah II,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
- pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan



10. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah III,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
  - pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
11. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah IV,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
  - pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
12. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah V,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
  - pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
13. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah VI,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
  - pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
14. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan kelayakan bahan konstruksi
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
15. Unit Pelaksanaan Teknis Peralatan Konstruksi
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pengelolaan alat konstruksi
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
16. Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Air Minum.
- Penyusunan dan perumusan kegiatan penyediaan air minum curah SPAM Regional

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan infrastruktur. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi ke satu dan dua yakni Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya dan Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.

#### 1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Tabel 1.1 Isu Strategis

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
Sub Urusan Jalan			
1.	Indeks aksesibilitas rata-rata tingkat Provinsi masih rendah yaitu 0,49	Kondisi jalan dalam keadaan mantap baru mencapai 64,94 % dan masih terdapat 35,06% jalan provinsi dengan kondisi kerusakan ringan sampai rusak berat pada tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala tidak dilakukan pada seluruh ruas karena keterbatasan anggaran.</li> <li>- Beban kendaraan yang melewati ruas jalan melebihi batas maksimal kekuatan jalan.</li> </ul>
		Masih terdapatnya jenis konstruksi perkerasan jalan yang masih sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran pembangunan jalan.</li> </ul>

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
Sub Urusan Air Minum			
2.	Terbatasnya akses air bersih yang berasal dari leding/perpipaan	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum melalui perpipaan masih 25,07% dari target akhir Renstra 2024 sebesar 100%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu identifikasi kondisi saluran rumah penerima layanan air minum perpipaan regional</li> <li>- Perlu percepatan penyediaan Saluran Rumah oleh Kab/Kota</li> <li>- Perlu koordinasi percepatan layanan air minum perpipaan regional</li> </ul>
Sub Urusan Penyehatan Lingkungan (Persampahan dan Air limbah)			
3.	Pengelolaan sanitasi belum optimal	Jumlah sampah dan limbah mengalami peningkatan akibat bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun	Belum tersedianya fasilitas pengelolaan sampah dan air limbah regional
Sub Urusan Sumber Daya Air			
4.	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Jaringan Irigasi	Kondisi jaringan irigasi yang kurang baik belum dapat melayani secara maksimal kebutuhan air pertanian	Pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin dan berkala tidak maksimal.
		Kondisi lahan pertanian yang teririgasi dengan baik Tahun 2022 yaitu masih sebesar 21,13% dari Target Renstra yaitu 29,43%	Terbatasnya anggaran APBN dan APBD dalam menangani kegiatan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan daerah irigasi rawa kewenangan Provinsi.
5.	Kerentanan resiko genangan banjir pada permukiman di Kawasan sungai dan pantai.	Tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir	Tidak adanya penanganan abrasi pantai yang maksimal.
		Tingginya sedimentasi pada DAS utama	Pemeliharaan kawasan penyangga DAS tidak dilakukan secara maksimal.
Sub Urusan Perumahan			

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
6.	Frekuensi Terjadinya Bencana di Provinsi Riau	Provinsi Riau termasuk daerah yang rawan bencana	Tingginya kerusakan rumah akibat bencana Fasilitasi Rumah korban bencana belum memadai
7.	Meningkatnya Program Pembangunan Pemerintah	Meningkatnya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Penanganan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah belum memadai.
<b>Sub Urusan Permukiman dan Kawasan Permukiman</b>			
8.	Lingkungan Permukiman Yang Tidak Layak dan Belum Tertata	Kawasan Kumuh yang masih belum ditangani secara maksimal	Luasnya Permukiman kumuh
			Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur
		Masih terdapat permukiman yang belum terpenuhi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitasnya	1. Belum teridentifikasi kebutuhan PSU Permukiman secara keseluruhan 2. Penyediaan PSU belum ditata per kawasan
<b>Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)</b>			
9.	Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang belum memadai	Luasnya Permukiman yang memerlukan infratraktur dasar yang layak	Belum seluruh masyarakat yang dapat menikmati akses layanan Infrastruktur Permukiman
			Besarnya Jumlah Permukiman yang belum mendapat layanan Infrastruktur Dasar
		Jangkauan Pelayanan Infrastruktur dasar yang belum menyeluruh	Masih Belum meratanya cakupan Komponen Prasarana, Sarana Lingkungan dan Utilitas Umum yang dibangun
			Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati hunian yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
			utilitas umum yang memadai
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
10.	Masih belum terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Pertanahan dengan baik	Belum tertatanya Layanan Pertanahan	Belum disusunnya Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Pemerintah Daerah
			Masalah Tumpang tindihnya kepemilikan lahan
		Belum tersedianya <i>data base</i> tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang secara memadai	Belum teridentifikasinya subyek dan obyek redistribusi tanah.
			Belum terinventarisirnya tanah adat/tanah ulayat.
			Belum terinventarisirnya tanah terlantar
		Belum Maksimalnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW

Sumber: Perubahan Renstra 2019-2024 Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas PUPRPKPP Riau

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	2020	2021	Target			Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	
1	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	$= \frac{\sum \text{bangunan dan kawasan yang diselenggarakan per tahun}}{\sum \text{bangunan dan kawasan yang diselenggarakan tahun 2024}} \times 100\%$	%	13,16	31,71	71,23	86	100	100
2	Meningkatnya aksesibilitas jalan	persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	$= \frac{\sum \text{panjang ruas jalan kondisi mantap}}{\sum \text{total panjang ruas jalan provinsi}} \times 100\%$	%	61,66	62,54	63,46	64,2	66,23	66,23
3	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	$= \frac{\sum \text{SR tersambung}}{\sum \text{total target SR pada wilayah layanan}} \times 100\%$	%	4,41	38,8	39,37	68,35	100	100
		persentase perencanaan SPALD Regional	persentase penyediaan dokumen perencanaan SPALD Regional	%	0	25	50	75	100	100
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	%	0	0	18,53	58,28	100	100
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$= \frac{\sum \text{luas lahan pertanian fungsional}}{\sum \text{luas lahan baku pertanian}} \times 100\%$	%		21,13	21,22	21,42	21,61	21,61
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Rata-rata persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%		5,47	5,74	6,29	6,63	6,63
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	$\sum$ nilai aspek turbinlak Kab/Kota	%	50,88	52	55	65	65	65
6	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	$= \frac{\sum \text{luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai dengan tahun penanganan}}{\sum \text{luas pemukiman kumuh kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	%	17,24	25,27	33,29	41,3	49,34	49,34
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	$= \frac{\sum \text{jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	%	1,8	22,73	42,73	65,45	88,18	88,18
7	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	$= \frac{\sum \text{jumlah tenaga ahli yang telah disertifikasi}}{\sum \text{jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi Provinsi Riau}}$	Rasio	29,23	30,38	31,91	33,46	35,00	35,00

Sumber: Perubahan Renstra 2019-2024 Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

### 2.1.1 Definisi Indikator

1. Indikator Satu : Persentase penyelenggaraan bangunan dan Kawasan strategis

Penyelenggaraan bangunan dan Kawasan strategis terdiri dari pembangunan bangunan dan Kawasan strategis, rehabilitasi/pemeliharaan bangunan dan Kawasan strategis. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, bangunan dan Kawasan strategis adalah bangunan dan lingkungan yang mendukung kepentingan strategis daerah.

Data penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2 Nilai bobot penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis*

	JENIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	PENYELENGGARAAN										TARGET 2024
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
A	PEMBANGUNAN	0,5		3,5		3,5		1		4,5		13
B	PEMELIHARAAN	3,58		1,25		8,25		0,58		0,33		14
C	PENATAAN KAWASAN	0		1		0,5		3		0,5		4
	TOTAL	4,08	13,16	5,75	18,55	12,25	39,52	4,58	14,77	5,33	17,19	31
	% AKUMULASI				31,71		71,23		86,00		100,00	

Angka target dihitung dari target bobot penyelesaian per tahun.



Tabel 2.3 Target bobot per tahun penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis

NO	Jenis Bangunan	Pelaksanaan					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>PEMBANGUNAN</b>						
1	MASJID RAYA PEKANBARU		√				100%
2	MASJID AN-NUR						
3	MASJID RAYA PROVINSI		√				100%
4	QUR'AN CENTER		√	√			100%
5	RIAU CREATIVE HUB		√	√			100%
6	SNVT					√	
7	GEDUNG OLAHRAGA PETALA BUMI			√			100%
8	UPT PERALATAN		√		√		
9	UPT LABOR		√	√			100%
10	UPT I					√	
11	UPT III					√	
12	UPT VI					√	
13	BKD				√	√	
14	UPT PAM (Mess)			√			100%
	<b>REHABILITASI</b>						
15	BALAI WARTAWAN NOERBAHRIC YOESOEUF			√			100%
16	GOR TRIBUANA			√			100%
17	ASRAMA ATLIT SPORT CENTER RUMBAL			√			100%
18	HALL SEPAK TAKRAW			√			100%
19	GELANGGANG REMAJA			√			100%
20	STADION KAHARUDIN NASUTION SPORT CENTER RUMBAL			√			100%

NO	Jenis Bangunan	Pelaksanaan					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
21	HALL BELADIRI SPORT CENTER RUMBAI			√			100%
22	KOMPLEK GEDUNG KEPEMUDAAN PROVINSI RIAU			√			100%
23	Lembaga Adat melayu Riau			√	√		100%
24	Anjungan Indragiri Hilir			√			100%
25	Kantor Bappedalitbang			√			100%
<b>PENATAAN KAWASAN</b>							
26	KAWASAN MASJID AN-NUR			√	√		
27	KAWASAN MASJID RAYA SENAPELAN				√	√	
28	KAWASAN ARIFIN AHMAD				√		
29	KAWASAN RIAU CREATIVE HUB			√			100%
30	KAWASAN TUGU PROKLAMASI		√				
31	KAWASAN Tanah Samratulangi (Pagar)			√			100%
<b>BOBOT PER TAHUN</b>		<b>3,08</b>	<b>5,75</b>	<b>12,25</b>	<b>4,58</b>	<b>5,33</b>	<b>31</b>

## 2. Indikator Dua : Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap

Jalan kondisi mantap merupakan proporsi jalan kondisi baik dan kondisi sedang dari total Panjang jalan provinsi. Total Panjang jalan provinsi berdasarkan SK jalan kewenangan Provinsi adalah 2.799,81 Km. Sesuai Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011 kondisi jalan terbagi ke dalam empat kriteria yaitu kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.

Formulasi perhitungan jalan mantap adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{panjang ruas jalan kondisi mantap}}{\sum \text{total panjang ruas jalan provinsi}} \times 100\%$$

3. Indikator Tiga : Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota

Indikator ini ditetapkan berdasarkan Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Salah satu SPM Pekerjaan Umum adalah pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota . Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Layanan air minum curah lintas Kab/Kota yaitu merupakan pemenuhan kebutuhan kapasitas air minum rumah tangga yang diukur melalui jumlah saluran rumah (SR) yang tersedia. Dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 2.4 Target Pemenuhan Kapasitas layanan air minum

		<b>RENCANA (RISPAM)</b>			
		<b>KAPASITAS</b>			<b>SR</b>
SPAM	DUROLIS	rohil	100	liter/detik	8.000
		dumai	150	liter/detik	12.000
		bengkalis	150	liter/detik	12.000
SPAM	Pku-Kampar	pku	20	liter/detik	1.600
		kampar	20	liter/detik	1.600
			<b>TOTAL</b>	<b>liter/detik</b>	<b>35.200</b>
<b>Target persentase</b>			<b>440</b>	<b>liter/detik</b>	

Secara kapasitas, kebutuhan air minum adalah 440 liter/detik. Jumlah SR yang dibutuhkan 35.200 unit. Layanan air minum merupakan proporsi saluran rumah terpasang terhadap target kebutuhan saluran rumah.

$$= \frac{\sum SR \text{ tersambung}}{\sum \text{total target SR pada wilayah layanan}} \times 100\%$$

Target per tahun ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Target persentase layanan air minum s/d 2024

Sasaran	2021	2022	2023	2024
Rohil	4.170	4170	6170	8000
Dumai	2.100	2100	6100	12000
Bengkalis	7.389	7389	9389	12000
Kampar	-	200	1600	1600
Pekanbaru	-	0	800	1600
Total SR	13.659	13.859	24.059	35.200
Target SR terlayani	35.200			
Persentase pelayanan (%)	38,80	39,37	68,35	100

#### 4. Indikator Empat : persentase perencanaan SPALD Regional

Indikator ini ditetapkan berdasarkan Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu SPM Pekerjaan Umum yaitu penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Untuk

menyediakan layanan air limbah perlu direncanakan terlebih dahulu Rencana Indul Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (RISPALD). Pada Renstra 2019 – 2024, dalam jangka waktu lima tahun tersebut, tahap yang bisa dipenuhi untuk penyediaan layanan air limbah adalah tahap perencanaan. Berikut adalah tahap yang direncanakan :

Tabel 2.6 Target penyediaan dokumen perencanaan s/d 2024

Jenis Dokumen	Target			
	2021	2022	2023	2024
Rencana Induk	1			
Studi Kelayakan		1		
DED			1	
AMDAL				1
<b>% per tahun</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>% akumulasi</b>		<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>

5. Indikator Lima : Persentase Luas lahan TPA yang terbangun

Indikator ini ditetapkan karena selain layanan pengolahan air limbah, sarana infrastruktur dasar yang perlu disediakan adalah pengolahan sampah. Pada renstra 2019 – 2024, direncanakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pekanbaru – Kampar. Rencana pembangunan TPA tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Target penyediaan lahan TPA

Jenis TPA	Luas lahan TPA terbangun (%)		
	2022	2023	2024
TPA Regional Pekanbaru - Kampar	18,53	58,28	100

6. Indikator Enam : Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Indikator ini menggunakan indikator kinerja kunci outcome yang terdapat pada Permendagri 18 Tahun 2020 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi merupakan proporsi luas daerah irigasi pertanian fungsional terhadap luas lahan baku pertanian pada daerah irigasi kewenangan.

$$= \frac{\sum \text{luas lahan pertanian fungsional}}{\sum \text{luas lahan baku pertanian}} \times 100\%$$

7. Indikator tujuh : Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.

Indikator ini menggunakan indikator kinerja kunci *outcome* yang terdapat pada Permendagri 18 Tahun 2020 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air merupakan Rata-rata persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 2.8 Formulasi indikator Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

Formulasi
Rata-rata persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air
$= \frac{A + B}{2}$
<b>A = Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir</b>
$A = \frac{C}{D} \times 100\%$
<b>C</b> = Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha)
<b>D</b> = Luas Kawasan Permukiman rawan banjir (Ha)
$C = \frac{\sum \text{Panjang Pengaman Tebing yang telah dibangun}}{\sum \text{Panjang Pengaman Tebing yang dibangun}} \times D$
Panjang Pengaman Tebing yang telah dibangun
Panjang Pengaman Tebing yang dibangun
<b>B = Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi</b>
$B = \frac{E}{F} \times 100\%$
<b>E</b> = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi
<b>F</b> = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi



8. Indikator delapan : Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau.

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah terdiri dari 5 kriteria aspek penilaian yaitu :

- a. Pengaturan penataan ruang
- b. Pembinaan penataan runag
- c. Perencanaan tata ruang
- d. Pemanfaatan ruang
- e. Pengendalian pemanfaatan ruang

Masing-masing aspek memiliki komponen penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.9 Komponen penyelenggaraan penataan ruang

Komponen		Hasil Penilaian
1. Pengaturan Penataan Ruang		
(+)	Penetapan Peraturan terkait Perencanaan Tata Ruang	Peraturan Daerah tentang RTRW sudah tersedia
(+)	Penetapan Peraturan terkait Pemanfaatan Ruang	Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Peraturan Gubernur tentang RKPD sudah tersedia
(-)		Peraturan terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang daerah belum tersedia

Komponen		Hasil Penilaian
		Peraturan terkait penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK belum tersedia <i>*dikecualikan</i>
	Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peraturan terkait penilaian perwujudan RTR belum tersedia <i>*dikecualikan</i>
(-)		Peraturan terkait pemberian insentif dan disinsentif belum tersedia
(-)		Peraturan terkait pengenaan sanksi administratif belum tersedia
		Peraturan terkait penyelesaian sengketa penataan ruang belum tersedia <i>*dikecualikan</i>
(+)		Surat Keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tersedia
2. Pembinaan Penataan Ruang		
(+)	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2021
(+)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang sudah dilaksanakan kepada perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, dan masyarakat
(-)	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang telah dilaksanakan namun hanya kepada perangkat daerah kabupaten/kota, dan belum dilaksanakan kepada masyarakat
(+)	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang telah dilaksanakan dengan mengirimkan peserta pada kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang yang diselenggarakan oleh instansi terkait
(+)	Penelitian, Kajian dan Pengembangan	Penelitian, kajian dan pengembangan bidang penataan ruang sudah dilaksanakan dan menghasilkan inovasi untuk peningkatan kualitas penataan ruang

Komponen		Hasil Penilaian
(-)	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sudah dilaksanakan dengan menampilkan informasi rencana tata ruang, namun belum dilengkapi dengan ketersediaan informasi pengaduan masyarakat di bidang penataan ruang dan belum dilakukan pemutakhiran
(+)	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat	Penyebarluasan informasi perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat sudah dilaksanakan melalui situs web yang dimutakhirkan secara berkala
(+)	Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat sudah dilaksanakan
	Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang	Pengembangan profesi perencanaan tata ruang sudah dilaksanakan <i>*dikecualikan</i>
3. Perencanaan Tata Ruang		
(+)	Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang	Kelengkapan muatan RTRW sudah sesuai
4. Pemanfaatan Ruang		
	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Penerbitan KKPR sudah pernah dilaksanakan <i>*dikecualikan</i>
(+)	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Program Dalam Rencana Pembangunan Daerah Dengan Indikasi Program Dalam RTR)	Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang belum tersedia <i>*dikecualikan</i>
		Terdapat kesesuaian rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang		

Komponen		Hasil Penilaian
	Penilaian Pelaksanaan KKPR Dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) belum pernah dilaksanakan <i>*dikecualikan</i>
	Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR belum pernah dilaksanakan <i>*dikecualikan</i>
(-)	Pemberian Insentif dan Disinsentif	Pemberian insentif dan disinsentif belum pernah dilaksanakan
(-)	Pengenaan Sanksi	Pengenaan sanksi sudah dilaksanakan, namun belum menyeluruh terhadap seluruh pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi
	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Penyelesaian sengketa penataan ruang belum pernah dilaksanakan <i>*dikecualikan</i>

9. Indikator sembilan : Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani.

Indikator Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani merupakan proporsi luasan Kawasan kumuh yang ditangani terhadap total luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi. Formulasinya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai dengan tahun penanganan}}{\sum \text{luas pemukiman kumuh kewenangan Provinsi}} \times 100\%$$

10. Indikator sepuluh : Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Indikator ini menggunakan indikator kinerja kunci *outcome* yang terdapat pada Permendagri 18 Tahun 2020

$$= \frac{\sum \text{jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

Jumlah lingkungan merupakan Kawasan permukiman yang dilayani PSU.

11. Indikator sebelas : Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi.

Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi merupakan proporsi tenaga ahli yang disediakan terhadap kebutuhan tenaga ahli konstruksi di Provinsi Riau. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{jumlah tenaga ahli yang telah disertifikasi}}{\sum \text{jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi Provinsi Riau}} \times 100\%$$

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA Tahun 2023

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	86 %
2.	Meningkatnya aksesibilitas jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	64,20 %
3.	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	68,35 %
		Persentase perencanaan SPALD Regional	75 %
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	58,28 %
4.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,42 %
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	6,29 %
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	65 %
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	41,31 %
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,45 %
7.	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi	33,46 %

Sumber: Perubahan Renstra 2019-2024 Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun-n merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.



Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

### 3.1.1 Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	%	86	94,73	110,02
2	Meningkatnya aksesibilitas jalan	persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	64,2	66,46	103,52
3	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	%	68,35	26,78	39,18
		persentase perencanaan SPALD Regional	%	75	50,00	66,67
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	%	58,28	0,00	0,0
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	21,42	21,22	99,07
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	rasio	6,29	6,13	97,46
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	%	65	74	113,85
6	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	%	41,3	41,3	100
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	65,45	65,45	100

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
7	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	Rasio	33,46	32,46	96,92

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 hampir mencapai target bahkan ada yang melebihi target, kecuali kinerja layanan air minum curah, perencanaan SPALD Regional dan kinerja pembangunan TPA. Capaian layanan air minum curah baru mencapai 39,18%, perencanaan SPALD 66,67%, pembangunan TPA belum ada realisasi.

### 3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi					
				2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	%	94,73	86,7	26,6	11,03	*	*
2	Meningkatnya aksesibilitas jalan	persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	66,46	64,94	62,97	62,23	*	*
3	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	%	26,78	25,07	20,45	4,41	*	*
		persentase perencanaan SPALD Regional	%	50	50	25	0	*	*
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	%	0	0	0	0	*	*
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	21,22	21,13	21,13	21,04	*	*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi					
				2023	2022	2021	2020	2019	2018
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	rasio	6,13	5,62	5,44	5,43	*	*
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	%	74	73,33	52	50,88	*	*
6	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	%	41,3	37,43	19,60	12,67	*	*
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	65,45	38,60	22,73	10,34	*	*
7	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	Rasio	32,43	30,71	30,19	29,74	*	*

(\*) = indikator berbeda dengan perubahan Renstra

Tahun 2018-2019 masih menggunakan indikator renstra sebelum perubahan sehingga tidak dapat dibandingkan.

Dari tabel di atas, perbandingan capaian setiap tahunnya dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut :

1. Indikator Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi



Gambar 1 Grafik Capaian Indikator 1

2. Indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap



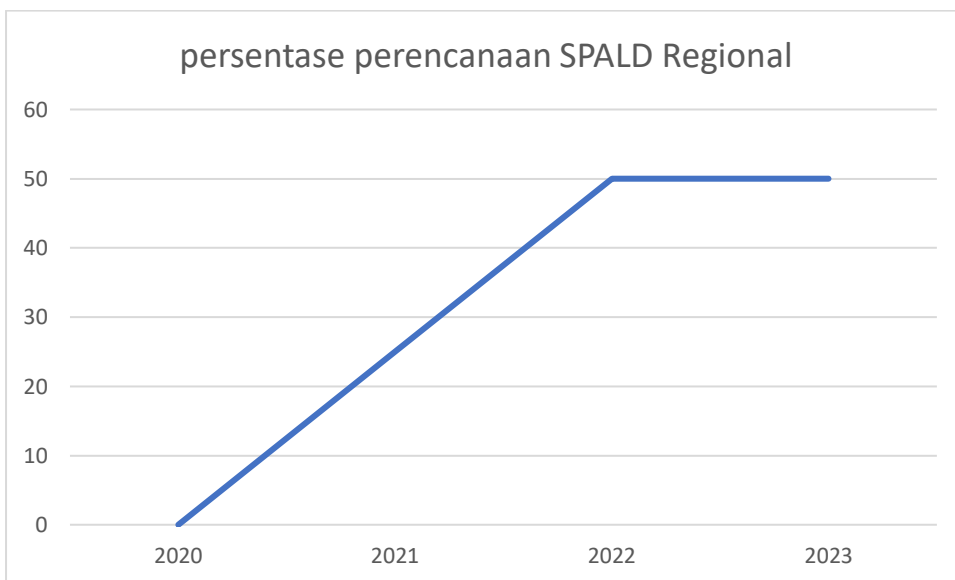
Gambar 2 Grafik Capaian Indikator 2

### 3. Indikator persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota



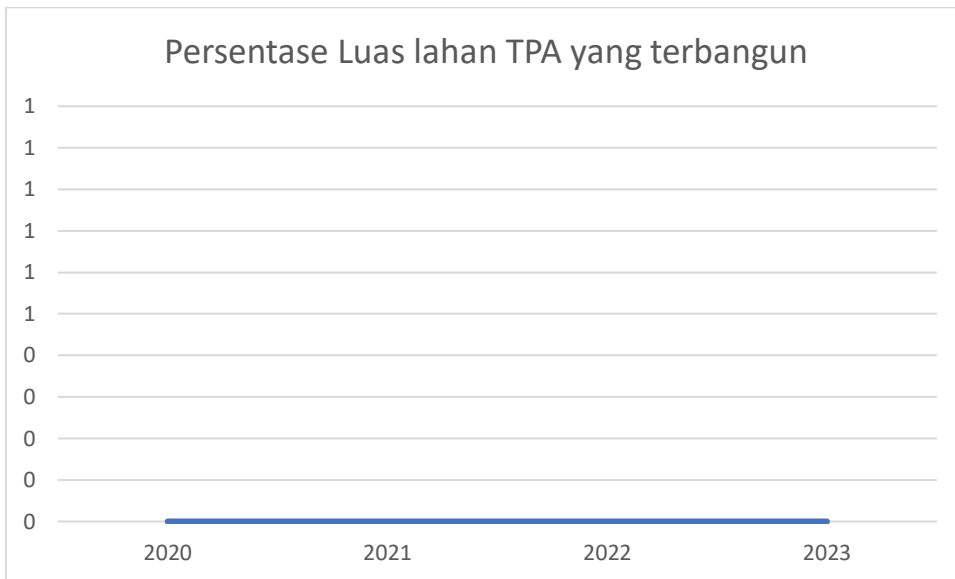
Gambar 3 Grafik Capaian Indikator 3

### 4. Indikator persentase perencanaan SPALD Regional



Gambar 4 Grafik Capaian Indikator 4

5. Indikator Persentase Luas lahan TPA yang terbangun



Gambar 5 Grafik Capaian Indikator 5

6. Indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi



Gambar 6 Grafik Capaian Indikator 6

7. Indikator Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air



Gambar 7 Grafik Capaian Indikator 7

8. Indikator kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau



Gambar 8 Grafik Capaian Indikator 8

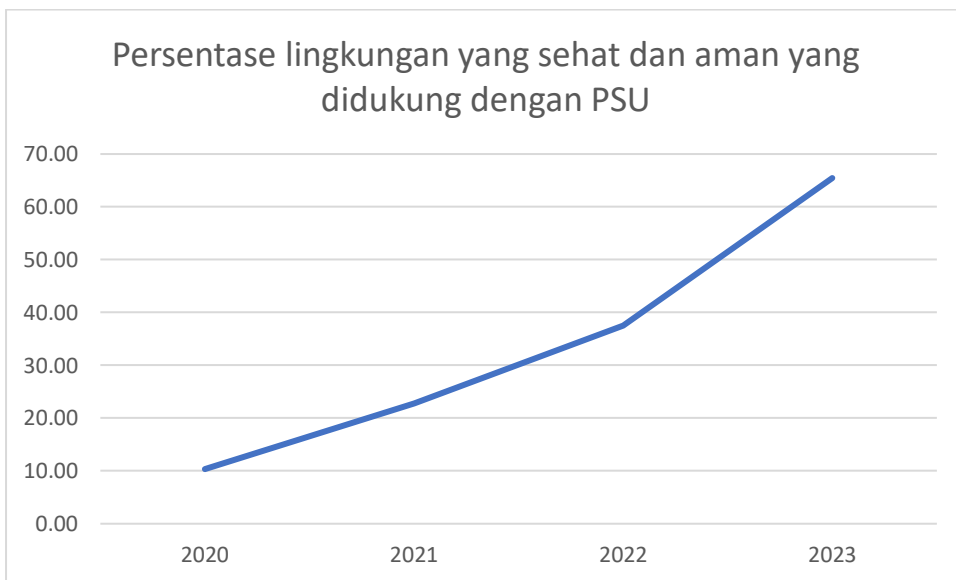


9. Indikator Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani



Gambar 9 Grafik Capaian Indikator 9

10. Indikator Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU



Gambar 10 Grafik Capaian Indikator 10

## 11. Indikator Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi



*Gambar 11 Grafik Capaian Indikator 11*

Rata-rata, kinerja Dinas PUPRPKPP mengalami peningkatan, kecuali kinerja layanan persampahan melalui TPA disebabkan TPA belum terbangun hingga saat ini karena keterbatasan kemampuan penyediaan anggaran.

### 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	86 %	86 %	94,73	110,15
2.	Meningkatnya aksesibilitas jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	64,2 %	64,2 %	66,46	103,52
3.	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	68,35 %	68,35 %	26,78	39,18
		Persentase perencanaan SPALD Regional	75 %	75 %	50,00	66,67
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	58,3 %	58,3 %	0,00	0,00
4.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,49 %	21,49 %	21,22	98,74
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	6,29 %	6,29 %	6,13	97,46

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	60 %	60 %	74,00	123,33
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	41,31 %	41,31 %	41,35	100,10
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,45 %	65,45 %	65,45	100,00
7.	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi	33,46 %	33,46 %	32,43	96,92

Target perjanjian kinerja sama persis dengan target Renstra karena target Renstra sudah mengalami perubahan pada dokumen perubahan renstra sehingga target perjanjian kinerja tidak perlu mengalami penyesuaian. Oleh karena itu capaian perjanjian kinerja dengan capaian target renstra sama. Rata-rata capaian kinerja hampir mencapai target dan ada yang melebihi target.

### 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi PK 2023	Target/Standar Nasional*	Realisasi Nasional 2023*
1.	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	86	%	94,73	*	
2.	Meningkatnya aksesibilitas jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	64,2	%	66,46	*	
3.	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	68,35	%	26,78	*	
		Persentase perencanaan SPALD Regional	75	%	50,00	*	
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	58,3	%	0,00	*	
4.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,49	%	21,22	*	
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	6,29	%	6,13	*	
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan	60	%	74,00	*	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi PK 2023	Target/Standar Nasional*	Realisasi Nasional 2023*
		penataan ruang daerah Provinsi Riau					
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	41,31	%	41,35	*	
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,45	%	65,45	*	
7.	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi	33,46	%	32,43	*	

(\*) berbeda indikator

Indikator kinerja Dinas PUPRPKPP berbeda dengan indikator nasional terkait kewenangan, oleh karena itu, capaian kerjanya tidak dapat dibandingkan.

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6 Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	%	86	94,73	110,15
2	Meningkatnya aksesibilitas jalan	persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	64,2	66,46	103,52
3	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	%	68,35	26,78	39,18
		persentase perencanaan SPALD Regional	%	75	50,00	66,67
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	%	58,3	0,00	0,00
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	21,49	21,22	98,74
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	rasio	6,29	6,13	97,46
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	%	60	74,00	123,33
6	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	%	41,31	41,35	100,10
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	65,45	65,45	100,00
7	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	Rasio	33,46	32,43	96,92

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, analisis dilakukan per indikator melalui tabel dengan format sebagai berikut :

### A. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Tabel 3.7 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
1	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	%	86	94,73	110,15	sangat tinggi
2	Meningkatnya aksesibilitas jalan	persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	64,2	66,46	103,52	sangat tinggi
3	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	%	68,35	26,78	39,18	Sangat rendah
		persentase perencanaan SPALD Regional	%	75	50,00	66,67	sedang
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	%	58,3	0,00	0,00	sangat rendah
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	21,49	21,22	98,74	sangat tinggi
		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	rasio	6,29	6,13	97,46	sangat tinggi
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	%	60	74,00	123,33	sangat tinggi
6	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	%	41,35	41,35	100,10	Sangat tinggi
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	65,45	65,45	100,00	sangat tinggi
7	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	Rasio	32,43	32,43	96,92	sangat tinggi



#### Penyebab Keberhasilan :

1. Indikator Bangunan Gedung : penyelesaian bangunan gedung strategis digesa dalam rangka mengejar target akhir renstra
2. Indikator Jalan : penambahan pagu yang signifikan pasca pandemi covid pada Program Penyelenggaraan Jalan meningkatkan realisasi kinerja sehingga melebihi target
3. Indikator Jaringan Irigasi : dari target renstra, luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi masih sama seperti tahun lalu
4. Indikator Penataan Ruang : Koordinasi intensif dengan Kab/kota dan pihak terkait
5. Indikator Kawasan Kumuh : Penanganan Kawasan kumuh merupakan salah satu program prioritas sehingga penganggarnya cukup signifikan
6. Indikator PSU : penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada lingkungan permukiman mendapat alokasi anggaran sangat besar, oleh karena itu target tercapai
7. Indikator Jasa Konstruksi : Dari target 150 peserta yang dilatih, hanya 2 orang yang tidak lulus uji

#### Upaya :

1. Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan
2. Optimalisasi pengumpulan data
3. Pengusulan anggaran sesuai kebutuhan
4. Tindakan percepatan melalui kebijakan
5. Mempertahankan kinerja baik

## B. Solusi

Terkait kinerja yang memiliki capaian kinerja rendah, solusi yang dianalisa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Solusi

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	%	68,35	26,78	39,18	Sangat rendah
		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	%	58,3	0,00	0,0	sangat rendah

Penyebab Kegagalan :

1. Indikator air minum :
  - a. banyak pipa saluran rumah (SR) yang rusak sehingga tidak menerima layanan air
  - b. belum ditetapkan Perda Tarif di Rohil karena lamanya proses penyusunan Perda distribusi
2. Indikator sanitasi :
  - a. Belum ada pendanaan TPA
  - b. Peralihan TPA ke TPST membutuhkan proses

Upaya :

1. Optimalisasi data ketersediaan SR
2. Mendorong Kab/Kota dalam penyediaan SR melalui koordinasi intensif
3. Mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan pencapaian kinerja penyediaan sarana sanitasi

Solusi :

1. Koordinasi intensif dengan Kab/Kota terkait data kondisi SR dan penetapan tarif layanan
2. pembinaan teknis SDM Kab/Kota
3. Alternatif pembiayaan (Bankeu)
4. Memulai proses penyediaan TPST (dokumen perencanaan dll)

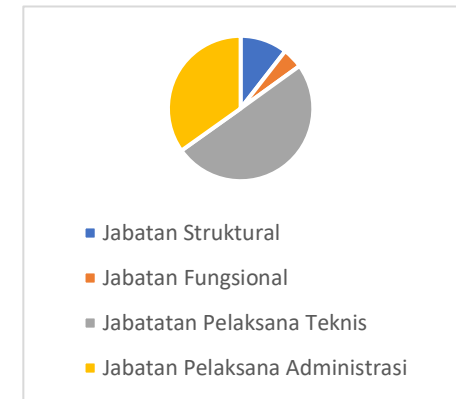
### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Sarana dan Anggaran)

Jumlah pegawai Dinas PUPRPKPP berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Data Jenis Jabatan Dinas PUPRPKPP Riau

DINAS PUPRPKPP	JUMLAH PEGAWAI
Jabatan Struktural	55
Jabatan Fungsional	22
Jabatan Pelaksana Teknis	240
Jabatan Pelaksana Administrasi	168
<b>Jumlah</b>	<b>485</b>

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dinas PUPRPKPP



Gambar 12 Diagram Jenis Jabatan

Dinas PUPRPKPP merupakan dinas teknis yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan di bidang infrastruktur. Secara tugas dan fungsi memang dibutuhkan pelaksana teknis. Secara porsi, jumlah jenis jabatan yang tersedia pada Dinas PUPRPKPP sudah memenuhi kriteria. Untuk melihat optimalisasi distribusi jabatan per bidang diperlukan data jumlah jenis jabatan per bidang.

Rincian jenis jabatan per bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Rincian Jenis Jabatan Per Bidang

NAMA BIDANG / UPT	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana Teknis	Jabatan Pelaksana Administrasi	Jumlah	Bobot (%)
SEKRETARIAT	4	13	14	31	62	12,78
SUMBER DAYA AIR	3	2	10	7	22	4,54
BINA MARGA	3	1	92	52	148	30,52
CIPTA KARYA	3	1	12	13	29	5,98
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	3	31	4	39	8,04
PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	3	1	19	7	30	6,19
BINA JASA KONSTRUKSI	3	1	5	8	17	3,51
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I	4	0	2	4	10	2,06
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II	4	0	5	5	14	2,89
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III	4	0	4	4	12	2,47
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV	4	0	6	7	17	3,51
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V	4	0	7	8	19	3,92
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI	3	0	6	3	12	2,47
UPT PERALATAN KONSTRUKSI	4	0	17	5	26	5,36
UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	4	0	5	5	14	2,89
UPT PENGELOLAAN AIR MINUM	4	0	5	5	14	2,89
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>240</b>	<b>168</b>	<b>485</b>	

Dari tabel di atas, jumlah pegawai paling banyak terdapat pada bidang Bina Marga.

#### D. Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran

Optimalisasi pemanfaatan SDM dilakukan dengan menyangdingkan bobot indikator, cakupan layanan kinerja, besaran anggaran per sasaran strategis dengan jumlah pegawai per bidang pelaksana kinerja sasaran. Ada 3 (tiga) faktor yang digunakan untuk menentukan bobot indikator, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM), Isu Strategis, dan pendukung Indikator Daerah (IKU Gubernur). Masing-masing faktor diberi poin bobot, SPM dengan bobot paling besar karena harus dipenuhi, Isu strategis memiliki bobot lebih tinggi daripada IKU Gubernur karena bersifat strategis. Jika dilihat dalam tabel, adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.11 Bobot Indikator*

Bidang Urusan	SPM (poin bobot : 4)	Isu Strategis (poin bobot : 3,5)	IKU Gubernur (poin bobot : 2,5)	Total Poin	Persentase bobot
Cipta Karya	√	√	√	10	16,67
Bina Marga	X	√	√	6	10
Sumber Daya Air	X	√	√	6	10
Pertanahan dan Penataan Ruang	X	√	X	3,5	5
Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	√	X	7,5	12,5
Jasa Konstruksi	X	X	X	0	0

Tabel 3.12 Bobot Pagu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Rp.)	BOBOT PAGU
1	2	3	4	5
<b>CIPTA KARYA</b>			228.133.976.051,00	13,29
1.	Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Kawasan Strategis Provinsi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	140.010.358.466,00	8,15
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	76.428.899.026,00	4,45
3.	Persentase Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.563.548.559,00	0,67
4.	Persentase Perencanaan SPALD Regional	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	63.510.000,00	0,00
5.	Persentase Luas Lahan TPA yang Terbangun	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	67.660.000,00	0,00
<b>BINA MARGA DAN UPT JALAN</b>			879.475.339.121,00	51,22
2.	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	879.475.339.121,00	51,22
<b>SUMBER DAYA AIR</b>			104.285.214.094,00	6,07

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023</b>	<b>PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN (Rp.)</b>	<b>BOBOT PAGU</b>
6.	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	48.789.374.297,00	2,84
7.	Rasio Luas Kawasan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	55.495.839.797,00	3,23
<b>PENATAAN RUANG</b>			<b>2.210.949.140,00</b>	<b>0,15</b>
8.	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Provinsi Riau	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.210.949.140,00	0,13
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	174.580.000	0,01
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	115.890.000	0,01
<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>502.316.932.507,00</b>	<b>29,25</b>
9.	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.397.442.920,00	0,20
10.	Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	490.012.649.792,00	28,54
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	8.906.839.795,00	0,52
<b>JASA KONSTRUKSI</b>			<b>685.412.037,00</b>	<b>0,04</b>
11.	Rasio Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	685.412.037,00	0,04

Jika dibandingkan dengan bobot SDM Tahun 2023, hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Analisa Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	BOBOT INDIKATOR	CAKUPAN LAYANAN	BOBOT PAGU	JUMLAH SDM	BOBOT SDM	HASIL PERBANDINGAN	ANALISA OPTIMALISASI
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)								
	<b>CIPTA KARYA</b>							<b>54</b>	<b>16,67</b>	<b>Regional</b>	<b>13,29</b>	<b>29</b>	<b>5,98</b>	Bobot SDM lebih rendah dari Bobot Indikator.	Bobot SDM lebih rendah dari bobot indikator, bobot anggaran cukup besar. Butuh penambahan SDM untuk mengejar kinerja
1.	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	86	%	94,73	%	110,15								
2.	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	68,35	%	26,78	%	39,18								
3.		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	58,3	%	0	%	0,00								
4.		Persentase perencanaan SPALD Regional	75	%	50	%	66,67								
	<b>BINA MARGA</b>							<b>104</b>	<b>10</b>	<b>12 Kab/Kota</b>	<b>51,22</b>	<b>148</b>	<b>47,84</b>	Bobot SDM melebihi bobot indikator	Bobot SDM melebihi bobot indikator. Namun karena bobot pagu dan cakupan layanan cukup besar, SDM yang ada optimal.
5.	Meningkatnya aksesibilitas jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	64,2	%	66,46	%	103,52								
	<b>SDA</b>							<b>98</b>	<b>10</b>	<b>DI dan WS Kewenangan</b>	<b>6,07</b>	<b>22</b>	<b>4,54</b>	Bobot SDM lebih rendah dari Bobot Indikator	Bobot SDM lebih rendah dari bobot indikator, namun bobot pagu kecil



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	BOBOT INDIKATOR	CAKUPAN LAYANAN	BOBOT PAGU	JUMLAH SDM	BOBOT SDM	HASIL PERBANDINGAN	ANALISA OPTIMALISASI
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)								
6.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,49	%	21,22	%	98,74							sehingga pelaksanaan kegiatan masih terakomodir	
7.		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	6,29	%	6,13	%	97,46								
	<b>PPR</b>							<b>123</b>	<b>5</b>	<b>12 Kab/Kota</b>	<b>0,15</b>	<b>30</b>	<b>6,19</b>	Bobot SDM melebihi Bobot Indikator	Bobot SDM melebihi bobot indikator, bobot pagu sangat kecil. Beberapa SDM perlu didistribusi ke Bidang yang membutuhkan.
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	60	%	74	%	123,33							Bobot SDM lebih rendah dari bobot indikator	Bobot SDM lebih rendah dari Bobot Indikator, bobot pagu cukup besar sehingga butuh penambahan SDM untuk mengejar kinerja
	<b>PKP</b>							<b>100</b>	<b>12,5</b>	<b>12 Kab/Kota</b>	<b>29,25</b>	<b>39</b>	<b>8,04</b>		
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	41,31	%	41,35	%	100,10								
10.		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,45	%	65,45	%	100,00								

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	BOBOT INDIKATOR	CAKUPAN LAYANAN	BOBOT PAGU	JUMLAH SDM	BOBOT SDM	HASIL PERBANDINGAN	ANALISA OPTIMALISASI
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)								
	<b>JAKON</b>						<b>96,24</b>	<b>0</b>	<b>12 Kab/Kota</b>	<b>0,04</b>	<b>17</b>	<b>3,51</b>	Bobot SDM lebih tinggi dari Bobot Indikator	Bobot SDM lebih tinggi dari Bobot Indikator, namun bobot pagu sangat kecil sehingga kegiatan masih bisa terakomodir	
11.	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	31,91	%	30,71	%	96,24								
	<b>TOTAL</b>							<b>100</b>			<b>285</b>	<b>100</b>			

### 3.1.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.14 Realisasi Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				
			TARGET PK 2023		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
	<b>CIPTA KARYA</b>						
1.	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	86	%	94,73	%	110,15
2.	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	68,35	%	26,78	%	39,18
3.		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	58,3	%	0	%	0,00
4.		Persentase perencanaan SPALD Regional	75	%	50	%	66,67

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				
			TARGET PK 2023		REALISASI		CAPAIAN KINERJA
							(%)
	<b>BINA MARGA</b>						
2.	Meningkatnya aksesibilitas jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	64,2	%	66,46	%	103,52
	<b>SDA</b>						
6.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,49	%	21,22	%	98,74
7.		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	6,29	%	6,13	%	97,46
	<b>PPR</b>						
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	60	%	74	%	123,33
	<b>PKP</b>						
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	41,31	%	41,35	%	100,10
10.		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,45	%	65,45	%	100,00
	<b>JAKON</b>						
11.	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	31,91	%	30,71	%	96,24

A. Program dan Kegiatan yang mendukung kinerja

1. Program kegiatan yang mendukung sasaran strategis Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis.

Tabel 3.15 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	86,00 %	86,00 %	94,73 %	110,15%	Bidang Cipta Karya	75%	71,9%	140.010.358.466,00	132.299.800.751,00	94,49%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
							2 Unit	2 Unit	140.010.358.466,00	132.299.800.751,00	94,49%	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
							15 Dokumen	14 Dokumen	99.948.950.283,00	92.805.201.345,00	92,85%	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
							21 Unit	21 Unit	40.016.408.183,00	39.494.599.406,00	98,59%	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
							83%	77,06%	76.428.899.026,00	71.359.927.887,00	93,37%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
							6 Kawasan	6 Kawasan	76.428.899.026,00	71.359.927.887,00	93,37%	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							7 Kawasan	6 Kawasan	76.362.034.026,00	71.329.840.387,00	93,41%	Penataan Bangunan dan Lingkungan
							7 Dokumen	7 Dokumen	66.865.000,00	30.087.500,00	45,00%	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Terdapat 2 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1. 2 program ini terdiri dari pembangunan dan penataan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan pembangunan dan rehabilitasi. Program penataan terdiri dari kegiatan penataan Kawasan.

Rincian bangunan dan lingkungan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan

NO	Jenis Bangunan	Pelaksanaan					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>PEMBANGUNAN</b>						
1	MASJID RAYA PEKANBARU		√				100%
2	MASJID AN-NUR						
3	MASJID RAYA PROVINSI		√				100%
4	QUR'AN CENTER		√	√			100%
5	RIAU CREATIVE HUB		√	√			100%
6	SNVT					√	
7	GEDUNG OLAHRAGA PETALA BUMI			√			100%
8	UPT PERALATAN		√		√		100%
9	UPT LABOR		√	√			100%
10	UPT I					√	
11	UPT III					√	
12	UPT VI					√	
13	BKD				√	√	
14	UPT PAM (Mess)			√			100%
	<b>REHABILITASI</b>						
15	BALAI WARTAWAN NOERBAHRIC YOESOEUF			√			100%

NO	Jenis Bangunan	Pelaksanaan					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
16	GOR TRIBUANA			√			100%
17	ASRAMA ATLETIC SPORT CENTER RUMBAI			√			100%
18	HALL SEPAK TAKRAW			√			100%
19	GELANGGANG REMAJA			√			100%
20	STADION KAHARUDIN NASUTION SPORT CENTER RUMBAI			√			100%
21	HALL BELADIRI SPORT CENTER RUMBAI			√			100%
22	KOMPLEK GEDUNG KEPEMUDAAN PROVINSI RIAU			√			100%
23	Lembaga Adat melayu Riau			√	√		100%
24	Anjungan Indragiri Hilir			√			100%
25	Kantor Bappedalitbang			√			100%
26	PUPRPKPP Provinsi Riau	√					100%
27	UPT Labor	√					100%
28	UPT Kab. Inhu (Bapenda)	√					100%
29	UPT Kab.Rohul (Bapenda)	√					100%
30	Gedung Dinas Pendidikan Cabang 4 Kab.Inhu					√	100%
31	Gedung KONI					√	100%
	<b>PENATAAN KAWASAN</b>						
32	KAWASAN MASJID AN-NUR			√	√		
33	KAWASAN MASJID RAYA SENAPELAN				√	√	
34	KAWASAN ARIFIN AHMAD				√		
35	KAWASAN RIAU CREATIVE HUB			√			100%
36	KAWASAN TUGU PROKLAMASI		√				100%
37	KAWASAN Tanah Samratulangi (Pagar)			√			100%

Dari Target 37 bangunan yang diselenggarakan, sampai dengan tahun 2023 baru tercapai 28 unit. Masih tersisa 9 bangunan lagi yang belum selesai namun sudah berprogres. Secara bobot, capaian kinerja penyelenggaraan bangunan Gedung sudah 94,37%, dengan tabulasi bobot (%) sebagai berikut :

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2023

	JENIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	PENYELENGGARAAN							
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A	PEMBANGUNAN	0,5		3,5		5,72		1	
B	PEMELIHARAAN	3,58		1,25		15,00		0,5	
C	PENATAAN KAWASAN	0		1		2,00		1	
	TOTAL	4,08	11,03	5,75	15,54	22,72	61,41	2,5	6,76
	% AKUMULASI				26,57		87,97		94,73

## 2. Program kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya aksesibilitas jalan

Tabel 3.18 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGETIKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	64,20 %	64,20 %	66,46 %	103,52%	Bidang Bina Marga	64,85%	66,46%	879.475.339.121,00	843.098.430.299,00	95,86	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
							1815,68 Km	1762,86 Km	721.054.154.207,00	843.098.430.299,00	116,93	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
							20 Dokumen	20	10.790.490.857,00	10.026.753.963,00	92,92	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGETIKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIANIKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							2 Dokumen	2	2.746.056.350,00	2.664.271.950,00	97,02	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
							37,69 Km	39,79	282.235.608.277,00	265.724.648.497,00	94,15	Pembangunan Jalan
							31,09 Km	39,56	271.260.370.657,00	269.975.828.689,00	99,53	Rekonstruksi Jalan
							379,9 M	295,10	131.692.778.856,00	115.815.649.006	87,94	Pembangunan Jembatan
							168 M	168	22.328.849.210,00	22.057.143.190	98,78	Pemeliharaan Berkala Jembatan
<b>UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I</b>												
							2,68 Km	2,68 KM	12.877.996.094,00	12.875.942.402,00	99,98	Rehabilitasi Jalan
							170,68 Km	170,68 KM	18.775.265.790,00	18.742.974.000,00	99,83	Pemeliharaan Rutin Jalan
							200 M	200 M	2.000.520.370,00	1.999.432.880,00	99,95	Pemeliharaan Rutin Jembatan
<b>UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II</b>												
							5 Km	0,265	369.968.567,00	356.385.900,00	96,33	Rehabilitasi Jalan
							75 Km	99,11	13.477.728.375,00	13.416.695.100,00	99,55	Pemeliharaan Rutin Jalan
							9 M	15,4	194.866.984,00	194.344.300,00	99,73	Rehabilitasi Jembatan
							61 M	208	1.646.520.858,00	1.640.400.400,00	99,63	Pemeliharaan Rutin Jembatan
<b>UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III</b>												
							27,99 Km	48,3 Km	8.624.878.151,00	8.561.539.300,00	99,27	Rehabilitasi Jalan
							30 Km	53,36 Km	10.485.237.445,00	10.421.386.450,00	99,39	Pemeliharaan Rutin Jalan
							500 M	165 M	261.900.159,00	234.738.100	89,63	Pemeliharaan Rutin Jembatan
<b>UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV</b>												
							1,5 Km	1,5	3.874.514.708,00	3.837.883.000,00	99,05	Rehabilitasi Jalan
							55 Km	55	24.635.437.679,00	24.594.310.000,00	99,83	Pemeliharaan Rutin Jalan
							35 M	35	2.999.952.680,00	2.988.328.000,00	99,61	Pemeliharaan Rutin Jembatan
<b>UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V</b>												
							1,46 Km	3,394	6.999.577.960,00	6.679.470.422,00	95,43	Rehabilitasi Jalan
							222 Km	230	24.431.280.314,00	24.235.543.100,00	99,20	Pemeliharaan Rutin Jalan



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							66 M	82,02	902.188.080,00	887.880.000,00	98,41	Pemeliharaan Rutin Jembatan
<b>UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI</b>												
							1,76 Km	1,99 Km	7.521.856.200,00	7.451.031.200,00	99,06	Rehabilitasi Jalan
							80 Km	110 Km	18.118.958.600,00	17.498.061.350,00	96,57	Pemeliharaan Rutin Jalan
							25 M	0	-	-	00,00	Rehabilitasi Jembatan
							44 M	44 M	222.535.900,00	217.789.100	97,87	Pemeliharaan Rutin Jembatan

Setelah seluruh kegiatan dilaksanakan, kondisi jalan kewenangan Provinsi di telusuri lagi melalui kegiatan survey IRMS. Hasil survey IRMS yang belum diverifikasi Kementerian PUPR adalah 66,46%.

### 3. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatkan prasarana infrastruktur dasar

Ada tiga (3) indikator yang mendukung sasaran 3, yaitu penyediaan air minum, SPALD dan TPA.

Tabel 3.19 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 (Air Minum)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	68,35 %	68,35 %	26,78 %	39,18%	Bidang Cipta Karya	440 liter/detik	440 liter/detik	11.563.548.559,00	9.623.130.556,00	83,22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
							5774 m3	2262 m3	11.563.548.559,00	9.623.130.556,00	83,22	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
							2 Unit	2 Unit	3.969.664.225,00	3.966.792.040,00	99,93	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
							12 Kab/Kota	12 kab/Kota	63.510.000,00	53.956.250,00	84,96	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
<b>UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM</b>												
							3 Kab/Kota	0	122.760.000,00	-	0,00	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
							2 Unit	1 unit	5.188.448.991,00	4.306.990.509,00	83,01	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota

Indikator penyediaan air minum didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan jaringan perpipaan SPAM Durolis. Secara kapasitas, target program sudah memenuhi target. Namun kapasitas air yang tersedia belum mengalir ke seluruh saluran rumah yang ditargetkan.

Capaian layanan air minum curah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Penyediaan Air Minum

						2018		2019		2020		2021		2022		2023		
RENCANA (RISPAM)						REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		
		KAPASITAS		SR	SR	M3/hari	SR	M3/hari	SR	M3/hari	SR	M3/hari	SR	M3/hari	SR	M3/hari		
SPAM	DUROLIS	rohil	100	liter/detik	8.000										1.270	305	7.541	1.810
	400	dumai	150	liter/detik	12.000	1.800	432	2.700	648	6.270	1.505	7.000	1.680	1.850	444	4.490	1.078	
		bengkalis	150	liter/detik	12.000									5.506	1.321	5.498	1.320	

					2018	2019	2020	2021	2022	2023							
RENCANA (RISPAM)					REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI				
		KAPASITAS		SR	SR	M3/hari	SR	M3/hari	SR	M3/hari	SR	M3/hari	SR	M3/hari			
SPAM	Pku-Kampar	pku	20	liter/detik	1.600	-	-	-	0	-	0	-	0	-			
	40	kampar	20	liter/detik	1.600	200	48	200	48	200	48	200	48	1.080	259		
			<b>TOTAL</b>	<b>liter/detik</b>	<b>35.200</b>	<b>2.000</b>	<b>480</b>	<b>2.900</b>	<b>696</b>	<b>6.470</b>	<b>1.553</b>	<b>7.200</b>	<b>1.728</b>	<b>8.826</b>	<b>2.118</b>	<b>9.426</b>	<b>4.466</b>
					0		0		0		0		1.626		600		
	<b>Target persentase</b>		<b>440</b>	<b>liter/detik</b>		<b>1,36</b>		<b>1,98</b>		<b>4,41%</b>		<b>20,45%</b>		<b>25,07%</b>		<b>26,78%</b>	

Sampai dengan tahun 2023 baru 9.426 SR yang menerima layanan air minum.

Indikator pendukung capaian infrastruktur dasar kedua yaitu penyediaan TPA. Ada 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang mendukung capaian ini.

Tabel 3.21 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 (TPA)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023(%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	58,28 %	58,28 %	0 %	0,00%	Bidang Cipta Karya	35 %	0	67.660.000,00	60.971.550,00	90,11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
							35%	0	67.660.000,00	60.971.550,00	90,11	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
							12 Kelompok Masyarakat	12 Kelompok Masyarakat	67.660.000,00	60.971.550,00	90,11	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan

Pada tahun 2023, pembangunan TPA masih pada tahap pembangunan pagar untuk pengamanan asset lahan TPA.

Indikator pendukung capaian infrastruktur dasar kedua yaitu penyediaan layanan air limbah melalui SPALD.

Tabel 3.22 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 (SPALD)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Persentase perencanaan SPALD Regional	75 %	75 %	50 %	66,67%	Bidang Cipta Karya	25,00%	0	63.510.000,00	54.826.250,00	86,33	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
							1 Dokumen	1 Dokumen	63.510.000,00	54.826.250,00	86,33	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
							1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	0,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
							12 Orang	12 Orang	63.510.000,00	54.826.250,00	86,33	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sampai dengan tahun 2023, tahap penyediaan layanan SPALD masih dalam perencanaan (Studi kelayakan).

Rencana penyediaan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23 Rencana Penyediaan Dokumen SPALD

Jenis Dokumen	Target			
	2021	2022	2023	2024
Rencana Induk	1			
Studi Kelayakan		1		
DED			1	
AMDAL				1
<b>% per tahun</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>% akumulasi</b>		<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>

4. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya air

Tabel 3.24 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 (Jaringan Irigasi)

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,42 %	21,42 %	21,22 %	99,07%	Bidang Sumber Daya Air	25.072 Ha	25.132 Ha	48.789.374.297,00	45.082.390.770,00	92,40	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
							42,00%	41,35%	48.789.374.297,00	45.082.390.770,00	92,40	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1,000 Ha - 3,000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							3 Dokumen	3	6.590.759.065,00	6.530.351.800,00	99,08	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
							0,39 Km	0,9	8.159.643.235,00	7.744.567.096,00	94,91	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
							48 Km	60	15.227.431.669,00	12.422.758.505,00	81,58	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
							217,2 Km Berkala dan 1,13 Km Rutin	'217,2 ; 1,13	7.039.303.828,00	6.808.827.833,00	96,73	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
							238 Km Berkala dan 792,4 Km Rutin	238; 792,4	11.674.180.000,00	11.507.603.956,00	98,57	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
							15 Kawasan	15	98.056.500,00	68.281.580,00	69,63	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa

Sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya air didukung oleh 2 indikator, masing-masing indikator didukung dengan 1 program. Indikator pertama yaitu layanan jaringan irigasi. Pada tahun 2023, luas fungsional lahan pertanian adalah 24.818 Ha. Dari target 116.971 Ha, realisasi sudah mencapai 21,22%.

Indikator kedua yaitu Kawasan permukiman di sekitar Kawasan sungai dan pantai yang terlindung dari banjir. Indikator ini didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.25 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 (Penanganan Banjir)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	6,29 %	6,29 %	6,13 %	97,46%	Bidang Sumber Daya Air	12.880,11 Ha	13045,03	55.495.839.797,00	54.457.497.506,00	98,13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)
							23,72 Km	1,37	55.495.839.797,00	54.457.497.506,00	98,13	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantaipada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							3 Dokumen	3,00	736.716.383,00	702.517.313,00	95,36	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
							1 Dokumen	1	740.909.625,00	706.019.875,00	95,29	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDAWS Kewenangan Provinsi
							0,19 Km	0	523.614.345,00	508.542.072,00	97,12	Pembangunan Tanggul Sungai
							0,74 Km	0,836	24.912.722.959,00	24.855.763.009,00	99,77	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
							16,5 Km	226,07	26.641.425.830,00	25.975.128.214,00	97,50	Normalisasi/Restorasi Sungai
							0,082 Km	0,092	495.380.000,00	483.458.969,00	97,59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
							7 Dokumen	7	499.999.835,00	403.442.064,00	80,69	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
							4 Lembaga	4	152.868.000,00	127.942.950,00	83,70	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
							1 Dokumen	1	121.551.250,00	66.148.000,00	54,42	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
							6,4 Km	3	670.651.570,00	628.535.040,00	93,72	Operasi dan Pemeliharaan Sungai

Kawasan permukiman di sekitar Kawasan sungai dan pantai yang terlindung dari banjir didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan diukur dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 3.26 Realisasi Indikator Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

Indikator	Formulasi	Satuan	2023	
			Target	Realisasi
Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Rata-rata persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	rasio	6,29	6,13
	$= \frac{A + B}{2}$		6,29	6,13
	<b>A = Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir</b>	%	9,5625	8,58
	$A = \frac{C}{D} \times 100\%$	%	9,56	8,58
	<b>C = Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha)</b>	Ha	8.615,43	7.725,73
	<b>D = Luas Kawasan Permukiman rawan banjir (Ha)</b>	Ha	90.096,00	90.096
	$C = \frac{\sum \text{Panjang Pengaman Tebing yang telah dibangun}}{\sum \text{Panjang Pengaman Tebing yang dibangun}} \times D$		8.615,43	7.725,73



Indikator	Formulasi	Satuan	2023	
			Target	Realisasi
	Panjang Pengaman Tebing yang telah dibangun	Km	1,530	1,372
	Panjang Pengaman Tebing yang dibangun	Km	16,00	16
	<b>B = Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi</b>	%	3,01	3,69
	$B = \frac{E}{F} \times 100\%$	%	3,01	3,69
	E = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	Ha	4.343,51	5.319
	F = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi	Ha	144.200,000	144.200,00

4. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Tabel 3.27 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	60 %	60 %	74 %	123,33%	Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	28,57%	28,75%	2.210.949.140,00	1.883.659.965,00	85,20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
							2 Dokumen	2	326.887.000,00	214.823.219,00	65,72	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
							1 Dokumen	1 (65%)	322.747.000,00	211.373.219,00	65,49	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
							1 Dokumen	1	4.140.000,00	3.450.000,00	83,33	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
							3 Dokumen	2	621.725.720,00	570.120.256,00	91,70	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
							1 Dokumen	1	599.625.720,00	554.930.256,00	92,55	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
							1 Dokumen	1	22.100.000,00	15.190.000,00	68,73	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
							4 Kawasan	4	856.211.715,00	747.784.676,00	87,34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
							1 Dokumen	1	540.958.815,00	460.223.936,00	85,08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
							1 Dokumen	1	315.252.900,00	287.560.740,00	91,22	Sistem Informasi Penataan Ruang
							12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	406.124.705,00	350.931.814,00	86,41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
							1 Dokumen	1	406.124.705,00	350.931.814,00	86,41	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
							100%	100%	174.580.000,00	156.363.117,00	89,57	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
							2 Dokumen	4	174.580.000,00	156.363.117,00	89,57	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							3 Dokumen	4	174.580.000,00	156.363.117,00	89,57	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
							100%	100%	115.890.000,00	108.542.022,00	93,66	PROGRAM PENYELESAIAN SENSKETA TANAH GARAPAN
							3 Dokumen	3	115.890.000,00	108.542.022,00	93,66	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							1 Berita Acara	1	115.890.000,00	108.542.022,00	93,66	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sasaran penyelenggaraan penataan ruang didukung dengan 3 program dan 6 kegiatan.

Formulasi capaiannya diukur sebagai berikut :

Tabel 3.28 Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Aspek	Nilai	Predikat Kinerja
1	Pengaturan Penataan Ruang	75	sedang
2	Pembinaan Penataan Ruang	85	baik
3	Perencanaan Tata Ruang	100	baik
4	Pemanfaatan Ruang	100	baik
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	buruk
<b>Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang</b>		<b>73,33</b>	<b>sedang</b>
<b>Peringkat 24 dari 34 Provinsi</b>			

Keterangan: Baik  $\geq$  80; Sedang  $50 \geq x < 80$ ; Buruk  $< 50$

5. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman didukung oleh 3 program dan 4 kegiatan.

Tabel 3.29 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6 (Kumuh)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	41,31 %	41,31 %	41,35 %	100,10%	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	103 Ha	103,07 Ha	3.397.442.920,00	3.325.384.770,00	97,88	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
							7,9 Ha	9,76 Ha	3.397.442.920,00	3.325.384.770,00	97,88	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
							7,9 Ha	9,76 Ha	3.397.442.920,00	3.325.384.770,00	97,88	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Pada tahun 2023 capaian kinerja penanganan kumuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30 Capaian Penanganan Kumuh 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (HA)	PENANGANAN					TAHUN 2022	TAHUN 2023	CAPAIAN LUAS KAWASAN KUMUH TERTANGANI (HA)	CAPAIAN PENURUNAN LUAS KAWASAN KUMUH (HA)
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PEKANBARU	Rumbai Pesisir	14,60									14,60

NO.	KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (HA)	PENANGANAN					TAHUN 2022	TAHUN 2023	CAPAIAN LUAS KAWASAN KUMUH TERTANGANI (HA)	CAPAIAN PENURUNAN LUAS KAWASAN KUMUH (HA)
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Lembah Damai	13,00			- Drainase 1.753,70 Meter - Jalan Lingkungan 2.296 Meter					13,00	0,00
2.	DUMAI	Pangkalan Sesai	11,30									11,30
		Dumai Selatan	10,94									10,94
3.	KAMPAR											
4.	BENGKALIS	Perkotaan Bengkalis- Cik Mas Ayu	11,23			- Drainase 99 Meter - Jalan Lingkungan 1269,8 Meter					6,13	5,10
		Perkotaan Duri - Batang Serosa	13,11									13,11
		Permukiman Nelayan Tanjung Medang	11,81							- Jalan Lingkungan 610 Meter / 1,683 Ha	1,68	10,13
5	KUANTAN SINGINGI	Sawah Taluk	11,30			- Drainase 500,4 Meter	- Drainase 511 Meter				11,30	0,00

NO.	KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (HA)	PENANGANAN					TAHUN 2022	TAHUN 2023	CAPAIAN LUAS KAWASAN KUMUH TERTANGANI (HA)	CAPAIAN PENURUNAN LUAS KAWASAN KUMUH (HA)
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						- Jalan Lingkungan 619,05 Meter	- Jalan Lingkungan 894,50 Meter					
6.	PELALAWAN											
7.	SIAK	Kampung Tualang	12,04			- Drainase 330 Meter					12,04	0,00
8.	INDRAGIRI HULU	Sekip Hulu	13,58	- Jalan Lingkungan 2.296 Meter		- Jalan Lingkungan 136 Meter					10,58	3,00
		Kampung Dagang	14,89				- Drainase 1,034 Ha				14,89	0,00
							- Jalan Lingkungan 1,034 Ha					
		Air Molek 1	13,68									13,68
9.	INDRAGIRI HILIR	Pulau Kijang	13,09					- Drainase 1,034 Ha			10,97	2,12
								- Jalan Lingkungan 1,034 Ha				
				Teluk Pinang	11,85					- Jalan Lingkungan 836 Meter / 1,043 Ha	- Jalan Lingkungan 363 Meter / 1 Ha	2,04

NO.	KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (HA)	PENANGANAN					TAHUN 2022	TAHUN 2023	CAPAIAN LUAS KAWASAN KUMUH TERTANGANI (HA)	CAPAIAN PENURUNAN LUAS KAWASAN KUMUH (HA)
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	ROKAN HULU	Dusun 1	11,87						- Jalan Lingkungan 609,83 Meter / 2,403 Ha		2,40	9,47
		Tulang Gajah	10,22									10,22
		Petakur Bawah	10,96			- Drainase 1.862 Meter - Jalan Lingkungan 708,8 Meter		- Drainase 0,5 Ha  - Jalan Lingkungan 0,5 Ha			10,96	0,00
11.	ROKAN HILIR											
12.	KEPULAUAN MERANTI	Kawasan Kota Lama Selat Panjang	11,80							- Jalan Lingkungan 88 Meter / 0,243 Ha	0,24	11,56
		Kawasan Kota Lama Selan Panang I	14,80									14,80
		Kawasan Kota Lama Selan Panang II	13,20									13,20
JUMLAH TOTAL		20 KAWASAN	249,27								96,236	153,03

Sampai dengan tahun 2023 capaian penanganan kumuh tersisa 153,03 Ha.

Pada tahun 2023 capaian kinerja prasarana sarana umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6 (PSU)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,45 %	65,45 %	65,45 %	100%	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	25 Kawasan	25 Kawasan	490.012.649.792,00	480.190.928.890,00	98,00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)
							4 Jenis	4 Jenis	490.012.649.792,00	480.190.928.890,00	98,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
							1 Dokumen	1 Dokumen	936.339.705,00	529.148.625,00	56,51	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
							12 Lokasi	12 Lokasi	489.076.310.087,00	479.661.780.265,00	98,08	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
							100%	100%	8.906.839.795,00	5.428.019.925,00	60,94	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
							83 Unit	83 Unit	8.906.839.795,00	5.428.019.925,00	60,94	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
							20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	5.800.000.000,00	4.980.000.000,00	85,86	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
							63 Unit Rumah	25 Unit Rumah	3.106.839.795,00	448.019.925,00	14,42	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Indikator ke 2 pendukung sasaran Kawasan perumahan yaitu penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Indikator ini didukung oleh 2 program, yaitu penyediaan PSU dan Rumah layak huni. Capaian kinerja penyediaan PSU diukur dengan formulasi sebagai berikut :



Tabel 3.32 Target Penyediaan PSU

NO	Lingkungan yang ditangani	Jumlah Kawasan	Luas	Target							
				2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Kawasan PSU	80		19		28		25		38	
	<b>TOTAL AKUMULATIF</b>			<b>19</b>	<b>17,27</b>	<b>47</b>	<b>42,73</b>	<b>72</b>	<b>65,45</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Sampai dengan tahun 2023, terukur 72 kawasan sudah disediakan prasarana, sarana dan utilitas.

6. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi

Sasaran pelayanan jasa konstruksi didukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan

Tabel 3.33 Program Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 7 (Jasa Konstruksi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	33,46 %	33,46 %	32,43 %	96,92%	Bidang Bina Jasa Konstruksi	33,46%	32,43%	685.412.037,00	605.783.496,00	88,38	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
							90 Orang	90	560.812.037,00	503.727.496,00	89,82	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
							150 Orang	90	425.812.037,00	368.727.496,00	86,59	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
							150 Orang	90	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
							12 Dokumen	-	-	-	-	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cangkupan Daerah Provinsi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	REALISASI IKU 2023	CAPAIAN IKU 2023 (%)	SUMBER DATA	TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	PAGU PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023
										Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							12 Dokumen	-	-	-	-	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
							12 Dokumen	24	124.600.000,00	102.056.000,00	81,91	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
							12 Laporan	12 Laporan	49.830.000,00	47.489.750,00	95,30	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi
							12 Laporan	12 Laporan	74.770.000,00	54.566.250,00	72,98	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota

Formulasi perhitungan capaian hasil kinerja program dan kegiatan peningkatan jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

No.	Uraian	Data dasar Tahun 2021	Pertumbuhan Per Tahun											
			2020			2021			2022			2023		
			Rencana	Realisasi	Total	Rencana	Realisasi	Total	Rencana	Realisasi	Total	Rencana	Realisasi	Total
1	Alokasi Anggaran *) ( juta rupiah)	-	200,00	83,49		1.000,00	921,48		1.000,00	-		1.000,00	-	
2	Kebutuhan T. Ahli Konstruksi (org **)	13.274	13.274			13.274			13.274			13.274		
3			-											

No.	Uraian	Data dasar Tahun 2021	Pertumbuhan Per Tahun											
			2020			2021			2022			2023		
			Rencana	Realisasi	Total	Rencana	Realisasi	Total	Rencana	Realisasi	Total	Rencana	Realisasi	Total
	T. Ahli Konstruksi Tersedia (org)	4.008		60	3.967	150	90	4.057	150	148	4.205	150	90	4.305
4	Rasio Kebutuhan dan Ketersediaan T. Ahli	<b>30,195%</b>	<b>29,886%</b>			<b>30,564%</b>			<b>31,679%</b>			<b>32,433%</b>		
<b>Laju Pertumbuhan</b>			<b>-0,309%</b>			<b>0,678%</b>			<b>1,115%</b>			<b>0,753%</b>		

Dari target 13.472 tenaga ahli yang dibutuhkan di Provinsi Riau, baru tersedia 4.305 orang.

### **Program yang tidak mendukung pencapaian kinerja**

Program yang tidak mendukung pencapaian kinerja hanya satu (1) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi. Namun program ini mendukung kinerja SDM dan operasional kegiatan.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					ANGGARAN		
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	86,00	%	94,73	%	110	216.439.257.492,00	203.659.728.638,00	94,10
2.	Meningkatnya aksesibilitas jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	64,20	%	66,46	%	104	879.475.339.121,00	843.098.430.299,00	95,86
3.	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota	68,35	%	26,78	%	39	11.563.548.559,00	9.623.130.556,00	83,22
4.		Persentase Luas lahan TPA yang terbangun	58,28	%	0	%	0	67.660.000,00	1.561.131.569,76	2307,32
5.		Persentase perencanaan SPALD Regional	75	%	50	%	67	63.510.000,00	54.826.250,00	86,33
6.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,42	%	21,22	%	99	48.789.374.297,00	45.082.390.770,00	92,40
7.		Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	6,29	%	6,13	%	97	55.495.839.797,00	54.457.497.506,00	98,13

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4		5		6 = 5/4X100%	7	8	9 = 8/7 X 100
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	60,00	%	74	%	123	2.210.949.140,00	1.883.659.965,00	85,20
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	41,31	%	41,35	%	100	3.397.442.920,00	3.325.384.770,00	97,88
10.		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,45	%	65,45	%	100	490.012.649.792,00	480.190.928.890,00	98,00
11.	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)	33,46	%	32,43	%	97	685.412.037,00	605.783.496,00	88,38

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari analisis 7 (tujuh) sasaran strategis, dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatkan prasarana infrastruktur dasar merupakan sasaran yang belum tercapai sesuai target. Sementara sasaran strategis lainnya sudah hampir mencapai target bahkan melebihi target.

### 4.2. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang

Secara administrasi pelaksanaan kegiatan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing*
2. Melaksanakan dan mengikuti prognosis fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan/item pekerjaan sesuai dengan DPA yang telah disahkan

3. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan/item pekerjaan secara rutin
4. Peningkatan SDM melalui pelatihan

Untuk pencapaian kinerja strategis, permasalahan terkait tidak tercapainya kinerja akibat kewenangan membutuhkan koordinasi intensif atas kesepakatan pencapaian kinerja.